

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2026

Alamat :
Jl. Belitung Darat No. 118 A
Banjarmasin Kalimantan Selatan



www.kkpbanjarmasin.or.id



0511-3353948



Balai_Karkes_Banjarmasin

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini merupakan tahun kedua dari rencana kegiatan untuk lima tahun mendatang yang mengacu pada dokumen Rencana Aksi Kegiatan 2025 s.d 2029.

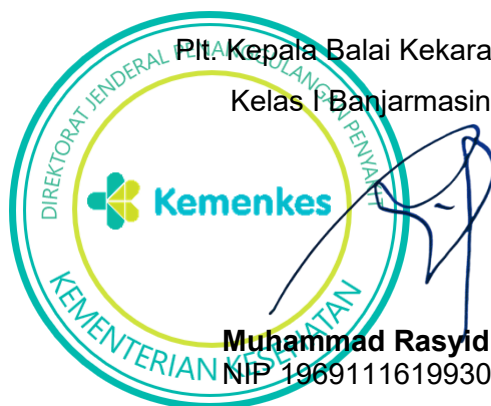
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisi gambaran kegiatan, sasaran, kegiatan, dan target kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan fokus dalam upaya pencapaian kinerja secara optimal.

Akhirnya kami berharap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2026 dan bahan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 s.d 2029 secara bertahap setiap tahunnya.



Banjarmasin, 30 Januari 2026

Pt. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Banjarmasin,



Muhammad Rasyid Ridha, S.KM., M.KL
NIP 196911161993031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	4
C. Sumber Daya Manusia	6
II. VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN.....	13
A. Visi	13
B. Misi	13
C. Tujuan	15
D. Sasaran Kegiatan.....	16
E. Rencana Kegiatan	22
III. RENCANA KERJA	37
A. Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan Pendanaan	39
B. Rincian Kegiatan	42
IV. PENUTUP	53
A. Pemanfaatan RKT	53
B. Pemantauan Pelaksanaan RKT	54
LAMPIRAN	55

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional secara optimal dapat tercapai apabila pembangunan kesehatan dapat terwujud. Hubungan keduanya sangat jelas dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena masyarakat yang sehat dapat memiliki pendidikan yang lebih baik, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, pendapatan dan tabungan yang lebih baik, perilaku dan kondisi hidup yang lebih sehat, serta stabilitas sosial yang lebih stabil. Pembangunan kesehatan di Indonesia harus menjadi prioritas agar pembangunan nasional berhasil. Pembangunan nasional yang tidak memperhatikan pembangunan kesehatan, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan nasional yang memperhatikan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan di Indonesia yang dimuat dalam RPJMN 2025 s.d 2029.

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 s.d 2029 terdapat berbagai agenda transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kerja, supermasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi, dimana telah memuat Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang mengusung "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**" dengan Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut **Asta Cita**. Berikut 8 misi yang disebut Asta Cita :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan kesehatan yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025 s.d 2029 masuk dalam agenda Transformasi Sosial antara lain Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam kondisi kesehatan masyarakat.

Sedangkan, dalam upaya mendukung misi keempat Asta Cita yaitu kesehatan yang merupakan salah satu cermin indikator utama keberhasilan pembangunan Indonesia. Hal ini mengingat *Human Development Index (HDI)*, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai faktor utama dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa dalam upaya mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*) tersebut, Kementerian Kesehatan berupaya antara lain dengan memperbaiki sistem kesehatan agar lebih kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan dengan melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup 6 jenis transformasi, seperti : transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

Dalam upaya mendukung penerapan transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas dan fungsi kekarantina kesehatan yang termasuk dalam pilar ketiga yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan memegang peran penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik ditengah ancaman kesehatan global. Apabila dilihat lebih jauh, cakupan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan yang terkait langsung

dengan fungsi kekarantinaan kesehatan yaitu : Memperkuat ketahanan tanggap darurat dengan melakukan jejaring nasional surveilans berbasis laboratorium, mempersiapkan tenaga cadangan tanggap darurat, dan melakukan *Table Top Exercise* kesiapsiagaan krisis.

Berdasarkan pilar ketiga tersebut, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan Kesehatan. Penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, dimana peraturan ini hanya merubah nomenklatur Unit Pelaksana Teknis tanpa merubah tugas dan fungsi yang sebelumnya ditetapkan, menjadi **Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin**.

Salah satu fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan adalah penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran. **Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin** yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menyusun Rencana Kinerja yang disusun setiap tahun dengan mengacu pada perencanaan dan anggaran Program P2P, dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA–KL) yang didalamnya memuat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan 2025 s.d 2029.

Untuk meningkatkan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, seiring perubahan organisasi dan tata laksana organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, terdapat perubahan nomenklatur sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Perubahan ini diharapkan akan lebih memudahkan dalam mengukur kinerja dan mewujudkan sasaran kegiatan secara lebih tepat, efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas kinerja khususnya Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Sebagai langkah awal mengantisipasi permasalahan dalam pencapaian kinerja perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P selama tahun 2020 s.d 2024, menunjukkan bahwa rata-rata target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai dan sebagian telah melampaui dari target jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa, rencana kinerja yang tersusun secara cermat disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala, sangat penting dan efektif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

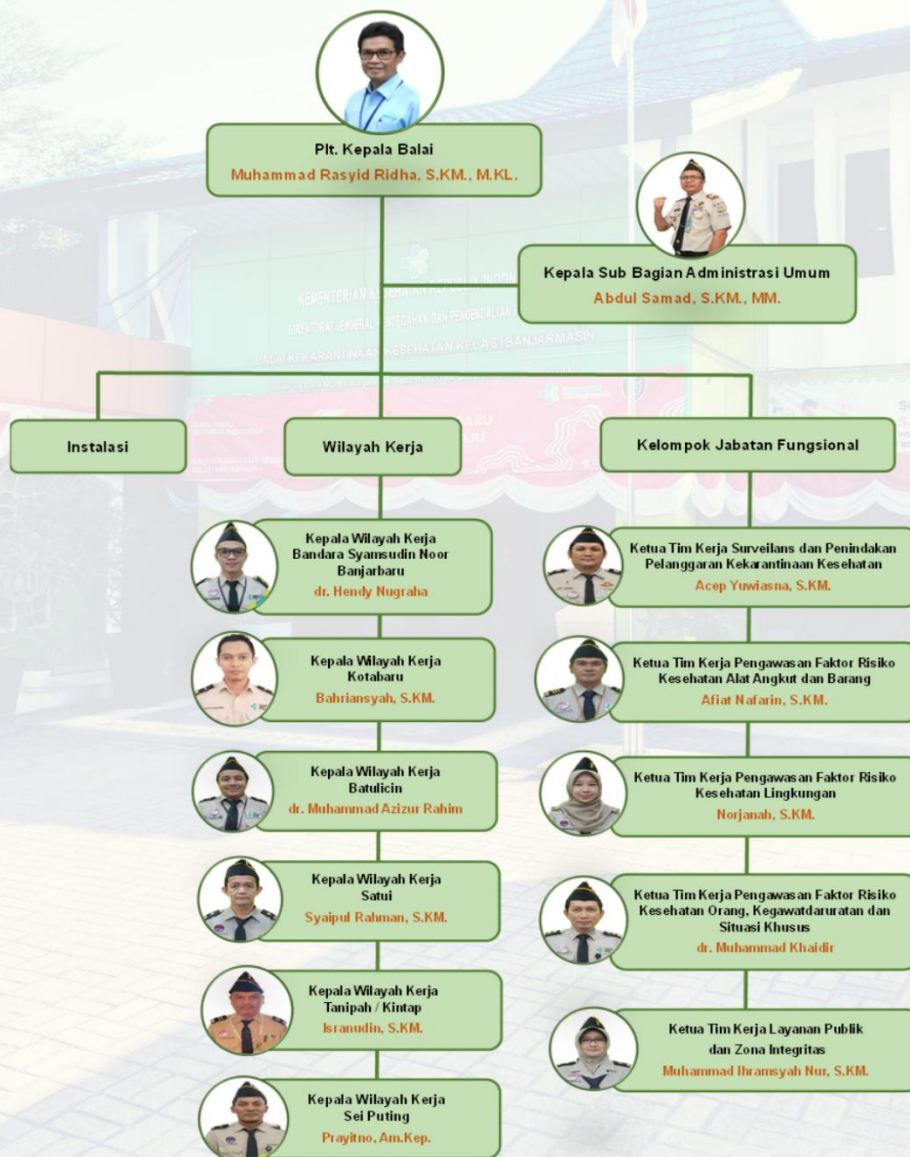
Adanya usaha dan kerja keras, sinergi dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan berbagai kebijakan perencanaan dan penganggaran yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, dan bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih relevan dengan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan melalui penyelarasan kegiatan hingga level Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi Presiden.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sehubungan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proposional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Balai Kekarantinaan Kesehatan, maka Menteri Kesehatan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang baru, sehingga struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum
Mempunyai tugas melakukan Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, Pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan Masyarakat, pengelolaan data dan informasi, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, Persuratan, dan kerumahtanggaan.
2. Instalasi
Merupakan unit pelayanan nonstruktural.
3. Wilayah Kerja
Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan, dapat dibentuk Wilker Balai Kekarantinaan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANJARMASIN



Gambar 1. Struktur Organisasi

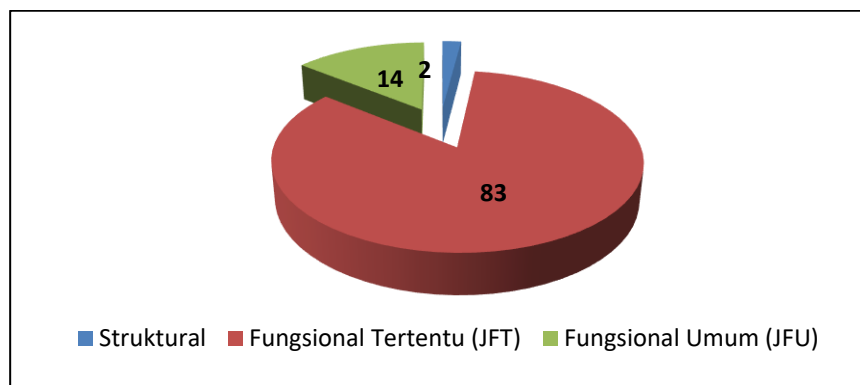
C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang merupakan kekuatan personil sampai dengan Bulan Juni 2025 di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi terdiri atas : PNS berjumlah 71 orang, CPNS berjumlah 8 orang PPPK berjumlah 20 orang. Keadaan ini apabila dibandingkan dengan volume kegiatan dan beban kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin masih sangat kurang. Untuk lebih jelasnya, gambaran tentang kekuatan personil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin sebagai berikut :

1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Berdasarkan kelompok jabatan, dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Jabatan Struktural
- b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
- c. Jabatan Fungsional Umum (JFU)



Grafik 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Dari grafik 1 menunjukkan bahwa pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin untuk Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional (JF) sebanyak 83 orang, dan Jabatan Pelaksana (JP) sebanyak 14 orang.

a. Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yaitu Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor dan Pejabat eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

b. Jabatan Fungsional (JF)

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Dari 83 orang dengan Jabatan Fungsional (JF) terdiri atas :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Dokter Muda	4
2	Dokter Pertama	3
3	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	2
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	5
6	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	2
7	Epidemiolog Kesehatan Mahir	2
8	Epidemiolog Kesehatan Terampil	3
9	Sanitarian Ahli Madya	1
10	Sanitarian Ahli Muda	4
11	Sanitarian Ahli Pertama	2
12	Sanitarian Penyelia	2
13	Sanitarian Mahir	1
14	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	2
15	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
16	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	3
17	Entomolog Kesehatan Mahir	2
18	Entomolog Kesehatan Terampil	3
19	Perawat Ahli Pertama	3
19	Perawat Penyelia	2
20	Perawat Mahir	1
21	Perawat Terampil	8
22	Asisten Apoteker Terampil	1
23	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1
24	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2
25	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	2
26	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1
27	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1
28	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
29	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
30	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
31	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
32	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
33	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
34	Perencana Ahli Pertama	1
35	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
36	Penata Laksana Barang Terampil	2
Total		83

c. Jabatan Pelaksana (JP)

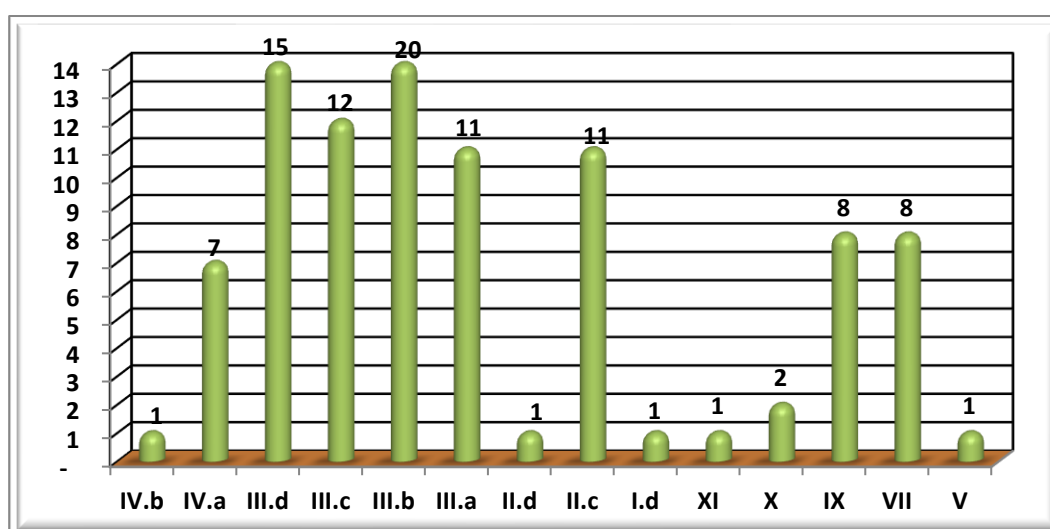
Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 14 orang dengan Jabatan Pelaksana (JP) terdiri atas :

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Pelaksana

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Dokter	1
2	Perawat	1
3	Sanitarian Ahli	2
4	Sanitarian	1
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli	1
6	Perencana	1
7	Analisis Keuangan	1
8	Pengelola BMN	1
9	Pengemudi	1
10	Pranata Layanan Operasional	3
11	Operator Layanan Operasional	1
Total		14

2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

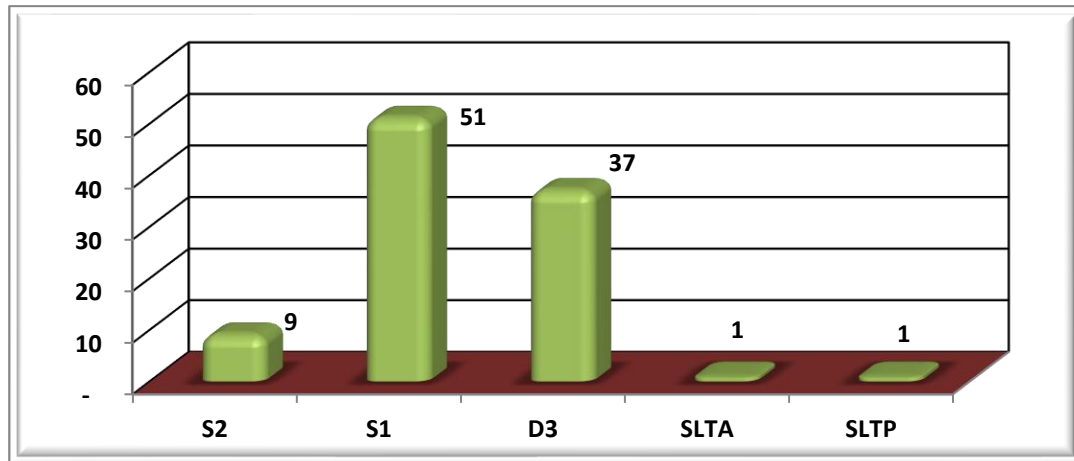
Golongan Ruang PNS yang terdapat pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin yang tertinggi Golongan IV.a dan terendah II.a sedangkan PPPK yang tertinggi Golongan IX dan terendah VII. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada grafik 2 berikut ini :



Grafik 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin memiliki jenjang pendidikan tertinggi Pasca Sarjana (S2) dan terendah SMP. Untuk lebih jelasnya, data pegawai tersebut dapat dilihat pada grafik 3 berikut:



Garfik 3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

4. Kebutuhan SDM dengan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/2017/2024 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen P2P, maka komposisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana saat ini apabila dibandingkan dengan kebutuhan SDM sesuai analisis beban kerja. Adapun rincian kebutuhan SDM sebagai berikut :

Tabel 3. Kebutuhan SDM Berdasarkan Peta Jabatan

No	Jenis Jabatan	Bezetting	Kebutuhan	Selisih
1	Dokter Ahli Madya	0	3	-3
2	Admiinstrator Kesehatan Ahli Madya	0	1	-1
3	Arsiparis Ahli Madya	0	1	-1
4	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	0	3	-3
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	2	6	-4
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	0	1	-1
7	Perawat Ahli Madya	0	1	-1
8	Sanitarian / Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	1	4	-3
9	Analisis Anggaran / Analisis Keuangan Negara Ahli Muda	0	1	-1
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN / Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	0	3	-3
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1	1	0
12	Dokter Ahli Muda	4	9	-5

No	Jenis Jabatan	Bezetting	Kebutuhan	Selisih
13	Administrator Kesehatan Ahli Muda	0	1	-1
14	Apoteker Ahli Muda	0	1	-1
15	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1	5	-4
16	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	12	-3
17	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	0	2	-2
18	Perawat Ahli Muda	0	3	-3
19	Pranata Komputer Ahli Muda	0	1	-1
20	Sanitarian / Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	4	6	-2
21	Dokter Ahli Pertama	3	10	-7
22	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	3	-2
23	Apoteker Ahli Pertama	0	1	-1
24	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	3	7	-4
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	5	15	-10
26	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	2	3	-1
27	Perawat Ahli Pertama	3	4	-1
28	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	0	1	-1
29	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
30	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	0	1	-1
31	Sanitarian / Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	2	8	-6
32	Asisten Apoteker Penyelia	0	1	-1
33	Entomolog Kesehatan Penyelia	0	1	-1
34	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	2	3	-1
35	Perawat Penyelia	2	3	-1
36	Pranata Komputer Penyelia	0	1	-1
37	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1	1	0
38	Sanitarian / Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	2	2	0
39	Asisten Apoteker Mahir	0	2	-2
40	Entomolog Kesehatan Mahir	2	2	0
41	Epidemiolog Kesehatan Mahir	2	4	-2
42	Perawat Mahir	1	7	-6
43	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	0	1	-1
44	Pranata Komputer Mahir	0	1	-1
45	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2	2	0
46	Sanitarian / Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	1	3	-2
47	Asisten Apoteker Terampil	1	2	-1
48	Entomolog Kesehatan Terampil	3	4	-1
49	Epidemiolog Kesehatan Terampil	3	5	-2
50	Perawat Terampil	8	8	0
51	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	0	1	-1
52	Pranata Komputer Terampil	0	2	-2
53	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	0	2	-2
54	Sanitarian / Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	2	4	-2

No	Jenis Jabatan	Bezetting	Kebutuhan	Selisih
55	Penata Layanan Operasional	6	1	5
56	Penata Layanan Kesehatan	6	2	4
57	Arsiparis Ahli Muda	0	3	-3
58	Analisis Anggaran / Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	1	1	0
59	Analisis Hukum Ahli Pertama	0	1	-1
60	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN / Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	1	3	-2
61	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0	2	-2
62	Arsiparis Ahli Pertama	0	2	-2
63	Perencana Ahli Pertama	1	1	0
64	Pranata Keuangan APBN / Pengawas Keuangan Negara Penyelia	1	1	0
65	Arsiparis Penyelia	0	2	-2
66	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	0	1	-1
67	Pranata Keuangan APBN / Pengawas Keuangan Negara Mahir	1	2	-1
68	Arsiparis Mahir	0	2	-2
69	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	0	1	-1
70	Pranata Laksana Barang / Pengawas Keuangan Negara Terampil	2	2	0
71	Pranata Keuangan APBN / Pengawas Keuangan Negara Terampil	1	2	-1
72	Arsiparis Terampil	0	2	-2
73	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1	1	0
74	Pranata Layanan Operasional	2	5	-3
75	Operator Layanan Operasional (SLTA)	1	2	-1
76	Operator Layanan Operasional (SLTP)	1	1	0
	Total	98	221	-122

Dari tabel 3 tersebut di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan SDM yang harus dipenuhi melalui mekanisme CASN atau CPPPK sebanyak 154 orang. Meskipun begitu saat ini untuk pelaksanaan dan pencapaian kinerja kegiatan telah dilakukan berbagai upaya optimalisasi penggunaan SDM melalui pembagian jadwal dan tugas tambahan agar pencapaian kinerja dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan apabila kebutuhan tenaga dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Parameter Kinerja		Penanggung Jawab Kegiatan	Jumlah ASN
			IKI Ketua Tim Kerja / Kepala Sub Bagian Adum	Target		
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan alat angkut	90%	Tim Kerja 2	Kantor Induk & Wilker : 17 orang
			Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan orang	90%	Tim Kerja 1 – 4	Kantor Induk & Wilker Timker 1 : 16 orang Timker 4 : 25 orang
			Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan barang	90%	Tim Kerja 2	Kantor Induk & Wilker : 17 orang
			Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan lingkungan	90%	Tim Kerja 3	Kantor Induk & Wilker : 20 orang
			Persentase pencatatan dan pelaporan surveilans alat angkut, orang, barang, dan lingkungan melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan	90%	Semua Timker	Kantor Induk & Wilker : 78 orang
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	83 Nilai	Sub Bagian Adum	Kantor Induk & Wilker : 20 orang
		Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	92,75 Nilai	Sub Bagian Adum	Kantor Induk & Wilker : 20 orang
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	Sub Bagian Adum	Kantor Induk & Wilker : 20 orang
		Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	96%	Sub Bagian Adum	Kantor Induk & Wilker : 20 orang
		Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam	95%	Tim Kerja 2	Kantor Induk & Wilker : 17 orang
		Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0 Penyalahgunaan	Sub Bagian Adum	Kantor Induk & Wilker : 20 orang

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

A. VISI

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global, dengan menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi, menuju peringatan 100 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 2045, maka Visi Presiden Republik Indonesia adalah Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, selaras dengan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan visi Tahun 2025 s.d 2029 yakni Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) menetapkan visi selaras dengan visi Kementerian Kesehatan yakni Populasi bebas penyakit mendukung Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis menetapkan visi yang sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) yakni Pintu Masuk serta bandara dan pelabuhan domestik yang bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah

B. MISI

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025 s.d 2029 terutama pada Asta Cita ke-4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025 s.d 2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN ke-4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025 s.d 2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
- b. Membudayakan gaya hidup sehat

- c. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
- d. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
- e. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
- f. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
- g. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Adapun Misi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan.
- b. Meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit.
- c. Memperkuat program imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- d. Mengendalikan risiko lingkungan terhadap kesehatan melalui pengawasan dan peningkatan kualitas sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan pengawasan lingkungan berbasis risiko.
- e. Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dengan mengembangkan sistem surveilans, dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/ wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi di wilayah dan pintu masuk negara.
- f. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program, Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif, Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola program.

Sedangkan Misi Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sistem surveilans, kemampuan deteksi penyakit, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit berpotensi KKMMD.
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di pintu masuk negara, wilayah buffer dan perimeter.
- c. Meningkatkan tata kelola pelayanan kekarantinaan kesehatan yang bersih, akuntabel dan prima yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan penguatan jejaring dengan stake holder terkait.

- d. Meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang akuntabel
- e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia.

C. TUJUAN

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 s.d 2029 menetapkan 7 tujuan yakni :

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif
6. Teknologi Kesehatan yang Maju
7. Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif, dan efisien

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit pada tahun 2025 s.d 2029 menetapkan 5 tujuan yang menjadi tujuan Unit Pelaksana Teknis sebagai satuan kerja di bawahnya yakni :

1. Terbebasnya pintu masuk negara dari penularan penyakit dan faktor risiko kesehatan.
2. Terwujudnya pintu masuk negara dengan kualitas lingkungan yang memenuhi syarat pada wilayah perimeter dan buffer
3. Terwujudnya pelayanan kekarantinaan kesehatan yang bersih, akuntabel dan prima dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi dan penguatan jejaring dengan stake holder terkait
4. Terwujudnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang akuntabel
5. Terwujudnya SDM yang unggul dan kompeten serta sarana prasarana sesuai standar dalam bidang kekarantinaan kesehatan.

D. SASARAN KEGIATAN

Dalam upaya mencapai tujuan, perlu ditetapkan Sasaran Strategis pada level Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit serta Sasaran Kegiatan pada level UPT atau Satker, agar tujuan pelaksanaan kegiatan dapat jelas dan terukur serta berorientasi hasil atau menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis d kegiatan Tahun 2025 s.d 2029 yakni :

1. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif
- b. Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan laboratorium kesehatan
- d. Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan
- e. Meningkatnya kualitas tata Kelola dan pembiayaan Kesehatan di pusat dan daerah
- f. Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
- g. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

2. Sasaran Strategis Program Penanggulangan Penyakit :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif, yaitu :
 - 1) Meningkatnya proporsi Kab/Kota yang menyelenggarakan skrining penyakit tidak menular prioritas
 - 2) Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi
 - 3) Meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular
 - 4) Meningkatnya tatalaksana penyakit kanker
 - 5) Menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun
 - 6) Meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL)
 - 7) Meningkatnya skrining risiko stroke di puskesmas
 - 8) Menurunnya insiden penyakit menular
 - 9) Meningkatnya eliminasi penyakit menular
 - 10) Menurunnya kematian akibat penyakit menular
 - 11) Menurunnya kejadian penyakit menular sensitif iklim

- b. Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat yaitu :
 - 1) Meningkatnya Desa/Kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan
 - 2) Menurunnya proporsi obesitas di Kab/Kota
- c. Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan yaitu :
 - 1) Meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespon dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
 - 2) Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
 - 3) Meningkatnya Kab/Kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan
 - 4) Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di Kab/Kota
 - 5) Menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan yaitu :
 - 1) Meningkatnya Kemampuan Surveilans Berbasis Laboratorium
 - 2) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan

3. Sasaran Kegiatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan

a. Periode 2025 :

Sasaran I :

Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN

Definisi operasional indikator adalah Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

2) Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Definisi operasional indikator adalah Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

3) Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN

Definisi operasional indikator adalah Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

Sasaran II :

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Nilai kinerja anggaran

Definisi operasional indikator adalah Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

2) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran

Definisi operasional indikator adalah Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

3) Kinerja implementasi WBK satker

Definisi operasional indikator adalah Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan dilakukan self assessment oleh Tim Penilai Internal Kemenkes RI.

4) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Definisi operasional indikator adalah ASN yang ditingkatkan *kompetensinya* paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) Tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

5) Persentase Realisasi Anggaran

Definisi operasional indikator adalah Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran.

b. Periode 2026 s.d 2029 :

Sasaran I :

Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah

Definisi operasional indikator ini adalah Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah.

Setiap pintu masuk internasional/domestik memenuhi kriteria apabila melaksanakan pengawasan/pemeriksaan untuk ke 4 nya / seluruhnya.

Cara perhitungan indikator yakni Jumlah Pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah dibagi dengan seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik dikali 100%.

Jumlah total pintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik : 9

Sasaran II :

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Nilai SAKIP

Definisi indikator ini adalah Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif

yang dilakukan oleh Tim SKI untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi, dan kualitas Unit Kerja dalam menerapkan SAKIP.

Cara perhitungan indikator ini yakni Indeks Penilaian (*Scoring Index*) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam instrumen evaluasi SAKIP dibagi dengan target nilai SAKIP dikali 100%.

2) Nilai Kinerja Anggaran

Definisi indikator ini adalah Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari :

- a. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK

- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.

Cara perhitungan indikator yakni 50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA), dibagi target nilai kinerja anggaran dikali 100%.

3) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas oleh Ditjen P2

Definisi indikator ini adalah Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap.

Cara perhitungan indikator yakni Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada hasil monitoring tahun berjalan yang

telah dinyatakan lengkap dibagi jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Unit Eselon I dikali 100%

4) Persentase Realisasi Anggaran

Definisi indikator ini adalah Perbandingan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan.

Cara perhitungan indikator ini yakni Realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan dikali 100%.

5) Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Alat Angkut Dalam Kategori Merah kurang dari 2x24 Jam

Definisi indikator ini adalah Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil risk based assesment dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun.

Cara perhitungan indikator ini yakni Jumlah dokumen kedatangan yang diterbitkan kurang dari 2x24 jam dibagi total alat angkut kategori merah dikali 100%.

6) Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance

Definisi indikator ini adalah Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang.

Cara perhitungan indikator ini yakni Jumlah penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang dibagi target penyalahgunaan kewenangan dikali 100%.

E. RENCANA KEGIATAN

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025 s.d 2029. Adapun parameter indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. **Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah**, dengan lokasi pintu masuk sebagai berikut :

- a. Pelabuhan Trisakti banjarmasin
- b. Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru
- c. Pelabuhan Kotabaru
- d. Bandara Syamsir Alam Kotabaru
- e. Pelabuhan Batulicin
- f. Bandara Bersujud Batulicin
- g. Pelabuhan Satui
- h. Pelabuhan Kintap
- i. Pelabuhan Sei Puting

Adapun rumusan strategi yang ditetapkan adalah :

- a. Pelaksanaan surveilans dan deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah di pintu masuk sesuai standar.
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan di BKK yang *real time* dan berbasis elektronik.

Indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh indikator kinerja individu Ketua Tim Kerja sebagai berikut :

- a. Pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan alat angkut, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
 - 1) Pengawasan kedatangan alat angkut (deklarasi kesehatan, sertifikat persetujuan karantina kesehatan)
 - 2) Pengawasan keberangkatan alat angkut (sertifikat persetujuan keberangkatan)

- 3) Pengawasan sanitasi alat angkut (sertifikat sanitasi)
 - 4) Pengawasan Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan
 - 5) Pengawasan riwayat faktor risiko perjalanan alat angkut (Buku Kesehatan Kapal)
 - 6) Pengawasan pelaksanaan tindakan penanggulangan pada alat angkut
- b. Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan orang/pelaku perjalanan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
- 1) Pengawasan faktor risiko kesehatan pelaku perjalanan (status vaksinasi pelaku perjalanan, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat laik terbang dan laik layar, deklarasi kesehatan)
 - 2) Pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat di pintu masuk (CKG)
 - 3) Pelaksanaan surveilans penyakit berpotensi KLB/wabah (surveilans: ILI, migrasi malaria, PIE, TB, HIV dan/atau EBS SKDR)
 - 4) Pengawasan pelaku perjalanan pada situasi khusus dan/atau kedaruratan medis
 - 5) Pengawasan dan/atau pelaksanaan tindakan penanggulangan pada orang
- c. Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan barang, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
- 1) Pengawasan izin angkut jenazah/kerangka/abu jenazah/selain jenazah (surat izin pengangkutan jenazah/abu jenazah)
 - 2) Pengawasan obat, makanan, kosmetik, alkes & bahan berbahaya (komoditas) (sertifikat kesehatan untuk OMKABA)
 - 3) Pengawasan bahan berbahaya (kontaminasi nuklir, sertifikat kesehatan untuk barang berbahaya)
 - 4) Pengawasan barang lainnya (barang bawaan penumpang, obat dan alkes pada penumpang maupun alat angkut)
 - 5) Pelaksanaan tindakan penanggulangan pada barang

- d. Persentase pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pengawasan/ pemeriksaan faktor risiko lingkungan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
 - 1) Inspeksi Kesehatan lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kes Ling (SBMKL).
 - 2) Uji Laboratorium hasil IKL, Analisis Risiko, dan rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi dan Uji Laboratorium
 - 3) Pengawasan dan/atau pelaksanaan Tindakan penanggulangan pada faktor risiko lingkungan di pintu masuk negara maupun pelabuhan/ bandara domestik.
 - 4) Inspeksi kesehatan lingkungan pada kondisi matra, dan/atau situasi khusus lainnya
- e. Persentase pencatatan dan pelaporan surveilans alat angkut, orang, barang, dan lingkungan melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
 - 1) Pencatatan dan pelaporan kegiatan surveilans faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan lingkungan melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan
 - 2) Ketepatan dan kelengkapan laporan kegiatan surveilans faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan lingkungan melalui sistem informasi kekarantinaan kesehatan

2. Nilai SAKIP

Adapun rumusan strategi yang ditetapkan adalah Melakukan perbaikan kualitas perencanaan kinerja, penyelarasan anggaran dengan sasaran, dan evaluasi internal rutin serta memastikan Indikator Kinerja Kegiatan berorientasi *outcome* (dampak), bukan sekadar output, dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi sebelumnya untuk membangun budaya kinerja, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Memastikan dokumen perencanaan (RAK/RKT) memiliki tujuan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang jelas, SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), dan berfokus pada hasil akhir.

- b. Menyelaraskan perencanaan anggaran (DIPA) dengan target kinerja, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan kegiatan.
- c. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala baik bulanan / triwulanan / semesteran untuk mendeteksi deviasi target dan mengambil tindakan korektif segera.
- d. Menggunakan data kinerja sebagai dasar dalam penguatan budaya kinerja terutama dalam pengambilan keputusan dan memastikan staf memahami penyusunan dokumen SAKIP.
- e. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi untuk memperbaiki kelemahan pada dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan berdasarkan rekomendasi evaluator.

3. Nilai Kinerja Anggaran

Adapun rumusan strategi yang ditetapkan adalah memastikan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi anggaran secara disiplin dan berbasis kinerja agar anggaran terserap tepat waktu, tepat sasaran, dan menghasilkan output–outcome yang optimal.

Indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh indikator kinerja individu Kepala Sub Bagian Administrasi Umum sebagai berikut :

- a. Persentase dokumen RKAKL (RKA, TOR, dan RAB) yang tersusun lengkap, akurat, dan tervalidasi sesuai standar, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
 - 1) Memastikan efisiensi dan efektifitas anggaran satker melalui desk/ verifikasi usulan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disusun.
 - 2) Memastikan kurva S RPK dan RPD terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Jumlah revisi anggaran di satker maksimal 4 kali dalam 1 tahun yang diproses sesuai PMK, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
 - 1) Monitoring ketat dan pembinaan kepada seluruh wilayah kerja agar mematuhi ketentuan tersebut.
 - 2) Monitoring deviasi halaman 3 DIPA kurang atau sama dengan 10%.

- c. Nilai IKPA Ditjen P2 yang dicapai sesuai target yang ditentukan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : Mengawal 8 parameter pelaksanaan anggaran

4. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti

Adapun rumusan strategi yang ditetapkan adalah :

- a. Memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berkualitas melalui penguatan koordinasi, pengendalian internal, dan akuntabilitas unit kerja.
- b. Pemantauan dan Monitoring Berkala: Melakukan rapat evaluasi tindak lanjut secara periodik (bulanan/triwulanan) untuk memantau progress penyelesaian temuan.
- c. Penyusunan Bukti Pendukung yang Valid: Memastikan setiap dokumen tindak lanjut (bukti fisik maupun administratif) lengkap, valid, dan disusun tepat waktu agar dapat diverifikasi oleh BPK.

Indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh indikator kinerja individu Ketua Tim Kerja dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum yaitu Persentase kesesuaian bukti tindak lanjut dengan rekomendasi BPK, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Menyusun rencana aksi
- b. Rapat Rekonsiliasi Berkala: Menyelenggarakan pemutakhiran data secara triwulanan antara unit kerja pelaksana, Inspektorat Jenderal, dan BPK untuk menyamakan persepsi terhadap bukti dukung.
- c. Memeriksa keabsahan dokumen bukti tindak lanjut sebelum diserahkan kepada auditor (BPK/Itjen/SKI).

5. Persentase Realisasi Anggaran

Adapun rumusan strategi yang ditetapkan adalah Melakukan optimalisasi realisasi anggaran pada semua jenis belanja dan jenis kegiatan program Ditjen Penanggulangan Penyakit, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran (penyerapan) dengan mempercepat proses lelang/pengadaan di awal tahun, mengoptimalkan belanja

- kontraktual (kontrak fisik/jasa), dan mengurangi penumpukan realisasi di akhir tahun (triwulan IV).
- b. Memastikan pelaksanaan anggaran secara tetap dan akuntabel pada semua jenis belanja dan jenis kegiatan penyelenggaraan pelayanan kekarantinaan kesehatan dan dukungan manajemen pelaksanaan program Ditjen Penanggulangan Penyakit.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala realisasi anggaran dan melakukan optimalisasi anggaran untuk meningkatkan capaian output.

6. Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam

Adapun rumusan strategi dan kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- a. Strategi Pra-Kedatangan (*Pre-Arrival*)
 - 1) Wajib menggunakan sistem elektronik untuk pengajuan *Maritime Declaration of Health* (MDH) atau *General Declaration* sebelum kapal / pesawat sandar.
 - 2) *Pre-screening* Kategori Merah: Tim Karantina Kesehatan menganalisis risiko berdasarkan data manifest, negara asal, dan laporan kesehatan dini untuk mempersiapkan tindakan khusus.
- b. Strategi Pemeriksaan (*On-Arrival*)
 - 1) Pemeriksaan Terintegrasi/Simultan: Pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen, dan pengambilan sampel dilakukan sekaligus oleh tim karantina kesehatan begitu alat angkut sandar (mengurangi waktu tunggu).
 - 2) Tim Respon Cepat (*Quick Response Team*): Mengerahkan tim khusus untuk alat angkut kategori merah guna melakukan tindakan kekarantinaan yang diperlukan secara efisien.
- c. Strategi Administrasi dan Penerbitan
 - 1) Penerbitan Digital (*e-Certificate*): Menggunakan *e-Signature* dan *e-Certificate* untuk mempercepat validasi dan pengiriman dokumen (seperti *Health Book* atau *Free Pratique*) tanpa menunggu fisik dokumen dicetak.
 - 2) Sistem Layanan 24/7: Menjamin ketersediaan petugas di pos karantina 24 jam untuk melayani kedatangan alat angkut.

- 3) *Integrated Border Management (IBM)*: Sinkronisasi data antara Karantina Kesehatan, Bea Cukai, Imigrasi, dan Otoritas Pelabuhan/Bandara untuk mempercepat proses di lapangan

7. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance*

Adapun rumusan strategi yang ditetapkan adalah Strategi ini mengintegrasikan pencegahan, pengawasan, dan penindakan tegas untuk menciptakan lingkungan kerja yang imun terhadap korupsi dengan kegiatan yang akan dilakukan :

- a. Penyusunan Pakta Integritas: Mewajibkan pimpinan dan seluruh staf menandatangani komitmen tertulis yang menegaskan tidak adanya ruang bagi penyimpangan.
- b. Penerapan *Whistleblowing System (WBS)*: Menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi pegawai atau publik untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tanpa rasa takut akan intimidasi.
- c. Penguatan Pengawasan Internal: Melakukan monitoring rutin terhadap tahapan kegiatan, *timeline*, dan rencana anggaran biaya (RAB) sejak awal untuk mendeteksi potensi kecurangan.
- d. Tindakan Korektif Instan: Memberikan sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin hingga pelaporan ke instansi berwenang (KPK/Kepolisian) segera setelah pelanggaran terbukti, guna memberikan efek jera (*deterrence*).
- e. Pembangunan Zona Integritas (ZI): Mengupayakan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui penataan manajemen SDM dan tatalaksana yang transparan.

Indikator ini digunakan untuk memantau apakah seorang Kepala Kantor telah melanggar prinsip integritas:

- a. Pelayanan Transaksional: Adanya praktik pungutan liar (pungli), suap, atau gratifikasi dalam memberikan layanan publik atau kedinasan.
- b. Konflik Kepentingan (Nepotisme/Kronisme): Menggunakan jabatan untuk memberi keuntungan bagi keluarga, kerabat, atau diri sendiri, termasuk dalam pengangkatan jabatan atau kontrak kerja.

- c. Penyimpangan Anggaran: Adanya penganggaran yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran, atau kekurangan volume pekerjaan konstruksi yang direkayasa.
- d. Manipulasi Informasi: Penggunaan data atau informasi organisasi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- e. Intimidasi & Penyalahgunaan Kekuasaan: Menggunakan otoritas untuk memaksa bawahan melakukan tindakan ilegal atau melakukan pelecehan (*bullying*) di tempat kerja

Sedangkan berdasarkan redesain sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO) / Komponen / Sub Komponen, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan

a. Koordinasi

Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah - Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kekarantinaan di Masuk Negara dan Wilayah :

- 1) Rapat Koordinasi / Evaluasi Forum Pelabuhan Sehat
- 2) Rapat Koordinasi Pengawasan Kesehatan Haji di Pintu Masuk
- 3) Pertemuan Koordinasi dan Pemantapan Hygiene Sanitasi Pangan Penjamah Makanan Catering Haji
- 4) Rapat Evaluasi Pengawasan Kesehatan Haji di Pintu Masuk
- 5) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Pelaku Perjalanan International
- 6) Pertemuan Koordinasi jejaring Surveilans Kalimantan Selatan

b. Sosialisasi dan Diseminasi

Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah :

- 1) Sosialisasi Layanan Kekarantinaan Kesehatan pada Barang (Jenazah / Abu / Kerangka)
- 2) Sosialisasi Tindakan Penanganan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
- 3) Sosialisasi Kegiatan Pengendalian vektor di Buffer Area Pelabuhan Trisakti dan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru

- 4) Sosialisasi Pengendalian Risiko Lingkungan bagi Penjamah Makanan di Pelabuhan / Bandara

c. Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara – Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat :

- 1) Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus Darurat
- 2) Pelayanan Vaksinasi
- 3) Verifikasi Terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang Mengajukan Persetujuan Penerbitan ICV
- 4) Pengawasan terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang Melaksanakan Penerbitan ICV

d. Pelayanan Publik Lainnya

1) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan –

Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan :

- a) Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan Pra Embarkasi
- b) Pemeriksaan dan Pengendalian Sanitasi Lingkungan Asrama Haji
- c) Survey dan Pengendalian Vektor dan BPP di Asrama Haji
- d) Pengawasan / Pemeriksaan Kualitas Air Minum, TTU dan Kualitas Makanan di Pelabuhan dan Bandara
- e) Pengelolaan Limbah Medis
- f) Koordinasi Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

2) Layanan Pemeriksaan Orang, Barang dan Alat Angkut – Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut :

- a) Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar udara (Wilker Kotabaru dan Batulicin)
- b) Pemeriksaan Alat Angkut, Orang, dan Barang pada Situasi KLB/Wabah/KKM
- c) Verifikasi Sinyal KLB/Wabah/KKM
- d) Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Situasi KLB/Wabah/KKM
- e) Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat Angkut, Orang, dan Barang pada Situasi KLB/Wabah/KKM

- f) *Reviu dan Table Top Exercise* Dokumen Rencana Kontigensi Pelabuhan Banjarmasin
 - g) Koordinasi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
 - h) Deteksi Dini HIV AIDS dan TB
-
- 3) **Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara**
Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara
 - 4) **Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD**
Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD
 - 5) **Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes dan Leptospirosis**
Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes dan Leptospirosis :
 - a) Pemetaan
 - b) Persiapan Bahan dan Alat
 - c) Pemasangan Perangkap
 - d) Identifikasi Tikus dan Pinjal
 - 6) **Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare**
Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare
 - 7) **Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD**
Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD
 - 8) **Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria**
Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit malaria
 - 9) **Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare**
Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare
 - 10) **Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS**
Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS
 - 11) **Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB**
Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit TB
 - 12) **Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan**
Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan
 - 13) **Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria**
Pelaksanaan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria

14) Layanan Kesehatan Haji pada Masa Embarkasi Skala Kecil

Pelaksanaan Layanan Kesehatan Haji pada Masa Embarkasi Skala Kecil
(Luar Kota)

15) Layanan Kesehatan Haji pada Masa Debarkasi Skala Kecil

Pelaksanaan Layanan Kesehatan Haji pada Masa Debarkasi Skala Kecil
(Luar Kota)

**16) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus
Skala Besar Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi**

Pelaksanaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus
Skala Besar Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi

e. Sarana Bidang Kesehatan

Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

1) Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan :

- a) Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP
- b) Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan dan Alat Angkut
- c) Pengadaan Bahan Alat Bahan Medis dan non Medis Untuk Pelayanan Kesehatan

2) Pengadaan Alat dan Bahan Penunjang Kekarantinaan

2. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi –
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi

b. Layanan Dukungan Manajemen Internal

1) Layanan Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum

Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS Ditjen P2P

2) Layanan Perkantoran

- a) Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Satker

(1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan

- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja
- b) Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan
 - (1) Pelaksanaan Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
 - (2) Langganan Daya dan Jasa
 - (3) Pemeliharaan Perkantoran
 - (4) Pelaksanaan Operasional Perkantoran

c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Sarana Internal, Pengadaan Fasilitas Perkantoran
Pengadaan Peralatan Perkantoran dan Layanan Publik

d. Layanan Manajemen SDM Internal

Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen P2P

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
- 2) Peningkatan Kualitas SDM Kualifikasi Karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi
- 3) Peningkatan Kualitas SDM Kualifikasi Tenaga Medis dan Paramedis
- 4) Pelatihan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun administratif yang berasal dari DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin Tahun 2026 telah mengikuti kebijakan redesain sistem penganggaran Kementerian / Lembaga yang merupakan salah satu pilar penting dalam rangka menuju kualitas anggaran yang memiliki akuntabilitas, transparansi, serta bukti integritas yang tinggi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran pada awal tahun sebesar **Rp.23.301958.000,00** kemudian terdapat kebijakan efisiensi anggaran (*self blocking*) menjadi sebesar **Rp.22.868.481.000** yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan utama yaitu Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan dan Dukungan Manajemen

Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit. Anggaran mengikuti redesain belanja yang terdiri atas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan. Adapun rincian alokasi anggaran kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Alokasi Anggaran Per Kegiatan, KRO dan RO
Tahun 2026

No	Kegiatan / KRO / RO		Alokasi Anggaran
I	Program Sistem Ketahanan Kesehatan		22.868.481.000
A.	Penyelenggaraan Pelayanan Kerantinaan Kesehatan		
1	7960.PEA	Koordinasi	183.691.000
	7960.PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	183.691.000
2	7960.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	57.075.000
	7960.PEF.001	Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Kekarantinaan Di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	57.075.000
3	7960.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	95.734.000
	7960.QAA.012	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	95.734.000
4	7960.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3.320.131.000
	7960.QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	120.824.000
	7960.QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	491.358.000
	7960.QAH.U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	168.960.000
	7960.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	31.876.000
	7960.QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	105.516.000
	7960.QAH.U09	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	15.424.000
	7960.QAH.U11	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	43.200.000
	7960.QAH.U12	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	13.760.000
	7960.QAH.U13	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	25.440.000
	7960.QAH.U14	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	28.908.000
	7960.QAH.U15	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	60.005.000
	7960.QAH.U19	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Di Pelabuhan	894.960.000
	7960.QAH.U20	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	17.460.000
	7960.QAH.U26	Layanan Kesehatan pada Masa Embarkasi Skala Kecil	631.680.000
	7960.QAH.U29	Layanan Kesehatan pada Masa Debarkasi Skala Kecil	479.360.000

No	Kegiatan / KRO / RO		Alokasi Anggaran
	7960.QAH.U32	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Besar Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	130.500.000
	7960.QAH.U34	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Besar Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	60.900.000
5	4249.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	2.114.222.000
	4249.RAB.001	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	2.114.222.0000
	Sub Jumlah		5.770.853.000
B.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit		
1	4815.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	406.350.000
	4815.CAN.001	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	406.350.000
2	4815.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16.496.599.000
	4815.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	58.274.000
	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	16.004.848.000
3	4815.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	125.500.000
	4815.EBB.951	Layanan Sarana Internal	125.500.000
4	4815.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	502.656.000
	4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	502.656.000
5	4815.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	351.615.000
	Sub Jumlah		17.097.628.000

Dari Tabel di atas, apabila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2025, Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO) menyesuaikan dengan distribusi pagu alokasi anggaran yang ditetapkan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit. Alokasi anggaran untuk kegiatan tugas dan fungsi 100% bersumber dana PNBPN, sehingga penyusunan rencana kegiatan juga dipengaruhi oleh izin penggunaan PNBPN untuk Satuan Kerja BKK yang ditetapkan oleh Kemenkeu dan tidak semua Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO) dapat digunakan. Hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan terutama dukungan manajemen pelaksanaan program dan pencapaian indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen, karena tidak semua indikator memiliki alokasi anggaran.

Meskipun begitu, alokasi anggaran Tahun 2026 meningkat dibandingkan Tahun 2025, karena adanya peningkatan penetapan target dan pagu PNPB dan peningkatan belanja pegawai dengan adanya penambahan CPNS dan CPPK Tahun 2025.

Apabila dibandingkan sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan dengan distribusi alokasi anggaran dapat digambarkan berdasarkan alokasi anggaran per kegiatan yang sesuai dengan kinerja yang akan dicapai seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Perbandingan Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Kegiatan	Target Kinerja	Kegiatan yang Mendukung	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	1	Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	76%	Penyelenggaraan Pelayanan Kekejarantinaan Kesehatan dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan program Di Ditjen P2	5.770.853.000
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2	Nilai SAKIP	83	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	17.097.628.000
		3	Nilai Kinerja Anggaran	92,75		
		4	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%		
		5	Persentase Realisasi Anggaran	96%		
		6	Penerbitan Dokumen Layanan Kekejarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	95%		
		7	Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0		

BAB III RENCANA KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi/Satker	:	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin
Program	:	1. Sistem Ketahanan Kesehatan 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara 2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan
Indikator Kinerja Program	:	1. Sistem Ketahanan Kesehatan Persentase Faktor Risiko Penyakit Di Pintu Masuk Negara yang Dikendalikan 96 persen 2. Dukungan Manajemen a. Nilai SAKIP dengan target 83 Nilai b. Nilai Kinerja Anggaran dengan target 92,75 Nilai c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan target 95% d. Persentase Realisasi Anggaran dengan target 96% e. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam dengan target 95% f. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance dengan target 0 Penyalanggunaan
Kegiatan	:	1. Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit

Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Program Sistem Ketahanan Penyakit : Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah dengan target 76 persen 2. Program Dukungan Manajemen : a. Nilai SAKIP dengan target 83 Nilai b. Nilai Kinerja Anggaran dengan target 92,75 Nilai c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan target 95% d. Persentase Realisasi Anggaran dengan target 96% e. Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan Kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam dengan target 95% f. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance dengan target 0 Penyalanggunaan

A. SASARAN KEGIATAN/KRO/RO DAN PENDANAAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target Volume RO	Alokasi 2026
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah						5.770.853
		<i>Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah</i>	76%	Koordinasi	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	18	183.691
				Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Kekarantinaan Di Pintu Masuk Negara Dan Wilayah	455	57.075
				Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	2400	95.734
				Pelayanan publik lainnya	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	41	120.824
					Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	180	491.358
					Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	192	168.960
					Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	26	31.876
					Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes dan Leptospirosis	36	105.516
					Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	32	15.424
					Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	120	43.200
					Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	8	13.760

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target Volume RO	Alokasi 2026
					Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	48	25.440
					Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	22	28.908
					Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	11	60.005
					Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	1356	894.960
					Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	18	17.460
					Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Skala Kecil	7	631.680
					Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Skala Kecil	7	479.360
					Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Besar Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	90	130.500
					Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Kecil Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	70	60.900
				Sarana Bidang Kesehatan	Pengadaan Alat dan Bahan Kejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	11	2.114.222
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						17.097.628
		Nilai SAKIP	83	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	30	406.350
				Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target Volume RO	Alokasi 2026
					Layanan Umum	4	0
				Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	12	125.500
					Layanan Prasarana Internal	2	0
				Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	98	0
					Layanan Pendidikan dan Pelatihan	59	502.656
				Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2	0
		Nilai Kinerja Anggaran	92,75	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	6	0
					Layanan Perkantoran	12	16.004.848
				Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18	0
					Layanan Manajemen Keuangan	5	0
		Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	5	0
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	5	0
		Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	95%	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Reformasi Kinerja	2	0
		Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Bantuan Hukum	2	58.274

B. RINCIAN KEGIATAN

1. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO) / Komponen	Tahun 2026			Prakiraan Maju					
			Volume	Satuan	Alokasi	Volume			Alokasi		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah					5.770.853				5.214.780	6.016.093	6.016.093
<i>Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah</i>	Koordinasi	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	18	Kegiatan	183.691	9	18	18	119.446	183.691	183.691
	Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Kekarantinaan Di Pintu Masuk Negara Dan Wilayah	455	Orang	57.075	290	455	455	34.050	57.075	57.075
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	2400	Orang	95.734	2400	2400	2400	98.890	98.890	98.890
	Pelayanan publik lainnya	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	41	Layanan	120.824	48	48	48	194.720	194.720	194.720
		Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	180	Layanan	491.358	192	192	192	563.426	563.426	563.426
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	192	Layanan	168.960	192	192	192	168.960	168.960	168.960
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	26	Layanan	31.876	26	26	26	31.876	31.876	31.876
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes dan Leptospirosis	36	Layanan	105.516	36	36	36	105.516	105.516	105.516

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO) / Komponen	Tahun 2026			Prakiraan Maju					
			Volume	Satuan	Alokasi	Volume			Alokasi		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	32	Layanan	15.424	32	32	32	15.424	15.424	15.424
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	120	Layanan	43.200	136	136	136	48.960	48.960	48.960
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	8	Layanan	13.760	8	8	8	13.760	13.760	13.760
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	48	Layanan	25.440	48	48	48	25.440	25.440	25.440
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	22	Layanan	28.908	22	22	22	28.908	28.908	28.908
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	11	Layanan	60.005	11	11	11	60.005	60.005	60.005
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	1356	Layanan	894.960	1356	1356	1356	894.960	894.960	894.960
		Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	18	Layanan	17.460	18	18	18	17.460	17.460	17.460
		Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Skala Kecil	7	Layanan	631.680	7	7	7	672.000	672.000	672.000
		Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Skala Kecil	7	Layanan	479.360	7	7	7	509.600	509.600	509.600
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Besar Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	90	Layanan	130.500	90	90	90	144.000	144.000	144.000

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO) / Komponen	Tahun 2026			Prakiraan Maju					
			Volume	Satuan	Alokasi	Volume			Alokasi		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Kecil Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	70	Layanan	60.900	70	70	70	67.200	67.200	67.200
	Sarana Bidang Kesehatan	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	11	Paket	2.114.222	11	11	11	1.400.179	2.114.222	2.114.222
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya					17.097.628				12.932.085	16.151.115	16.151.115
<i>Nilai SAKIP</i>	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	30	Unit	406.350	30	30	30	406.350	406.350	406.350
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	Layanan	0	2	2	2	20.180	20.180	20.180
		Layanan Umum	4	Layanan	0	4	4	4	469.510	469.510	469.510
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	12	Unit	125.500	12	12	12	125.500	125.500	125.500
		Layanan Prasarana Internal	2	Unit	0	2	2	2	4.895.270	8.114.300	8.114.300
	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	98	Layanan	0	98	98	98	27.810	27.810	27.810
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan	59	Orang	502.656	59	59	59	597.056	597.056	597.056

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO) / Komponen	Tahun 2026			Prakiraan Maju					
			Volume	Satuan	Alokasi	Volume			Alokasi		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2	Layanan	0	2	2	2	21.160	21.160	21.160
<i>Nilai Kinerja Anggaran</i>	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	6	Layanan	0	6	6	6	60.000	60.000	60.000
		Layanan Perkantoran	12	Layanan	16.004.848	12	12	12	5.872.314	5.872.314	5.872.314
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18	Dokumen	0	18	18	18	258.345	258.345	258.345
		Layanan Manajemen Keuangan	5	Dokumen	0	5	5	5	108.756	108.756	108.756
<i>Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti</i>	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	5	Layanan	0	5	5	5	0	0	0
<i>Persentase Realisasi Anggaran</i>	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Manajemen Keuangan	5	Orang	0	5	5	5	0	0	0
<i>Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam</i>	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Reformasi Kinerja	2	Layanan	0	2	2	2	11.560	11.560	11.560
<i>Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance</i>	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Bantuan Hukum	2	Layanan	58.274	2	2	2	58.274	58.274	58.274

2. Sumber Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Alokasi (000)				Lokasi
			Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
A	<i>Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah</i>			5.770.853		5.770.853	
1	<i>Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah</i>	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		183.691		183.691	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Kekarantinaan Di Pintu Masuk Negara Dan Wilayah		57.075		57.075	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Alokasi (000)				Lokasi
			Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
		Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas		95.734		95.734	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan		120.824		120.824	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut		491.358		491.358	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara		168.960		168.960	Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Alokasi (000)				Lokasi
			Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD		31.876		31.876	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes dan Leptospirosis		105.516		105.516	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare		15.424		15.424	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Alokasi (000)				Lokasi
			Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD		43.200		43.200	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria		13.760		13.760	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare		25.440		25.440	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Alokasi (000)				Lokasi
			Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS		28.908		28.908	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB		60.005		60.005	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan		894.960		894.960	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Kotabaru 2. Wilker Batulicin 3. Wilker Satui 4. Wilker Kintap / Tanipah 5. Wilker Sei Puting
		Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria		17.460		17.460	Wilayah Kerja : 1. Wilker Kotabaru 2. Wilker Batulicin
		Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Skala Kecil		631.680		631.680	1. Wilker Bandara Syamsudin Noor 2. Asrama Haji Banjarmasin

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Alokasi (000)				Lokasi
			Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
		Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Skala Kecil		479.360		479.360	1. Wilker Bandara Syamsudin Noor 2. Asrama Haji Banjarmasin
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Besar Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi		130.500		130.500	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Kecil Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi		60.900		60.900	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin
		Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk		2.114.222		2.114.222	Kantor Induk : Tim Kerja Wilayah Kerja : 1. Wilker Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru 2. Wilker Kotabaru 3. Wilker Batulicin 4. Wilker Satui 5. Wilker Kintap / Tanipah 6. Wilker Sei Puting
B	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		16.004.848	1.092.780		17.097.628	
2	Nilai SAKIP	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		406.350		406.350	Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output (RO)	Alokasi (000)				Lokasi
			Rupiah Murni	PNBP	PHLN	Jumlah	
		Layanan Umum					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Sarana Internal		125.500		125.500	Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Prasarana Internal					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Manajemen SDM					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan		502.656		502.656	Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
3	Nilai Kinerja Anggaran	Layanan BMN					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Perkantoran	16.004.848			16.004.848	Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
		Layanan Manajemen Keuangan					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
4	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Layanan Manajemen Keuangan					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
5	Persentase Realisasi Anggaran	Layanan Manajemen Keuangan					Kantor Induk : Sub Bagian Administrasi Umum
6	Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	Layanan Reformasi Kinerja					Kantor Induk : Pos Pelayanan dan Wilayah Kerja
7	Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	Layanan Bantuan Hukum		58.274		58.274	Kantor Induk : Kepala Balai

BAB IV

PENUTUP

A. PEMANFAATAN RKT

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Periode 2025 s.d 2029, yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kegiatan dan anggaran oleh pimpinan satuan kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Untuk kegiatan yang sedang dilaksanakan pada Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam upaya mencapai target indikator kinerja kegiatan hingga akhir tahun 2029 sesuai Rencana Aksi Kegiatan Periode 2025 s.d 2029. Berbagai kegiatan telah disusun untuk mendorong peningkatan dan percepatan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Selain itu, peningkatan kualitas anggaran yang sejalan dengan bertambahnya kegiatan yang akan dilaksanakan disusun secara akuntabel, transparans dan integritas yang tinggi dalam tahapan proses perencanaan hingga pengelolaan anggaran akan terus dipertahankan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas capaian kinerja kegiatan.

Tersusunnya Rencana Kinerja Tahun 2026 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan hingga akhir lima tahun mendatang seiring dengan kebijakan transformasi dalam rancangan teknokrasi RPJMN dan RAP Tahun 2025 s.d 2029 yang mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang baru berupa Asta Cita.

Sebagai upaya mendukung dan mewujudkan misi keempat Asta Cita yaitu kesehatan dengan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan memiliki peran dalam upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program yang tersusun dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Adapun pemanfaatan Rencana Kinerja Tahunan ini sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan program-program kegiatan kekarantinaan kesehatan dan pelaksanaan tata kelola administrasi yang baik.
2. Sebagai pedoman untuk penetapan anggaran berbasis kinerja agar konsisten baik dalam proses maupun ketentuan rencana kerja.

3. Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
4. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

B. PEMANTAUAN PELAKSANAAN RKT

Kegiatan pemantauan dilakukan setelah penetapan Rencana Kinerja Tahunan di awal tahun atau setelah dilakukan revisi, sehingga dapat diketahui tujuan akhir yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Hasil dari kegiatan pemantauan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan upaya perbaikan dan penyesuaian rencana kinerja pada tahun berjalan melalui mekanisme revisi atau menjadi dasar bagi penyusunan pada tahun yang akan datang. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi sangat bermanfaat :

1. Untuk mengkaji kesesuaian kegiatan dengan perencanaan melalui pemantauan tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan pemantauan tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang telah dijalankan.
3. Untuk melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan rencana kinerja dengan pencapaian tujuan (target) dan sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan yang telah ditetapkan diawal.
4. Untuk melakukan penilaian pola kerja dan manajemen kinerja yang digunakan secara tepat dalam pencapaian tujuan.
5. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja satuan kerja.

Untuk dapat mencapai target kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, didukung dengan kinerja yang lebih baik, optimal dan profesional, serta penguatan kepatuhan internal dalam pengawasan dan evaluasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kompetensi kualitas SDM agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.

TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Parameter	Target	Target Bulanan											
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	<i>Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah</i>	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
		<i>Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan alat angkut</i>	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		<i>Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan orang</i>	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Parameter	Target	Target Bulanan											
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	<i>Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan barang</i>	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		<i>Persentase pintu masuk negara maupun Pelabuhan/ bandara domestik yang melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan lingkungan</i>	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		<i>Persentase pencatatan dan pelaporan surveilans alat angkut, orang, barang, dan lingkungan melalui sistem informasi kekarantina kesehatan</i>	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai SAKIP	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Parameter	Target	Target Bulanan											
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
		Nilai WBK/WBBM dan implementasi perubahan budaya kerja	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
		Indeks Kualitas SDM	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
		Nilai Maturitas Manajemen Risiko	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Nilai Kinerja Anggaran	92,75	47	48	49	51	53	55	57	61	67	73	85	92,75
		Persentase dokumen RKAKL (RKA, TOR, dan RAB) yang tersusun lengkap, akurat, dan tervalidasi sesuai standar.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah revisi anggaran di satker maksimal 4 kali dalam 1 tahun yang diproses sesuai PMK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Parameter	Target	Target Bulanan											
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Nilai IKPA Ditjen P2 yang dicapai sesuai target yang ditentukan	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55	92,55
		Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase kesesuaian bukti tindak lanjut dengan rekomendasi BPK	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Realisasi Anggaran	96%	2%	7%	15%	21%	27%	36%	40%	46%	52%	58%	64%	96%
		Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENARIKAN DANA TAHUN 2026

IKK	Rincian Output (RO)	Target RO	Pagu	Bulan Rencana Pelaksanaan dan Penarikan Dana												PJ
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	18	183.691	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.691	Semua Timker
	Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Kekarantinaan Di Pintu Masuk Negara Dan Wilayah	455	57.075		11.750			4.775	4.775	5.350	7.200	4.775	4.775	4.775	4.775	Timker 1, 2, 3
	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	2400	95.734		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.734	Timker 1, 4
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	41	120.824		10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984	Timker 3
	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	180	491.358		44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	45.358	Timker 1-5, SBA
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	192	168.960		15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	Timker 4
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	26	31.876		2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.976	Timker 3
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes dan Leptospirosis	36	105.516		9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590	9.616	Timker 3

IKK	Rincian Output (RO)	Target RO	Pagu	Bulan Rencana Pelaksanaan dan Penarikan Dana												PJ
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	32	15.424		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.424	Timker 3
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	120	43.200		4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	9.848	Timker 3
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	8	13.760		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.260	Timker 3
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	48	25.440		2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.340	Timker 3
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS	22	28.908				5.780		5.780		5.780		5.780		5.788	Timker 4
	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	11	60.005				12.000		12.000		12.000		12.000		12.005	Timker 4
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	1356	894.960		81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360	Timker 2
	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	18	17.460		1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.660	Timker 1
	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Skala Kecil	7	631.680					631.680								Timker 4
	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Skala Kecil	7	479.360							479.360						Timker 4

IKK	Rincian Output (RO)	Target RO	Pagu	Bulan Rencana Pelaksanaan dan Penarikan Dana												PJ
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Persentase Pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	32	15.424		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.424	Timker 3
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Besar Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	90	130.500	43.500		43.500									43.500	Timker 4
	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus Skala Kecil Wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	70	60.900	20.300		20.300									20.300	Timker 4
	Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	11	2.114.222		192.202	192.202	192.202	192.202	192.202	192.202	192.202	192.202	192.202	192.202	192.202	Timker 3
Nilai SAKIP	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	30	406.350				406.350									Subbag Adum
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2	0													Subbag Adum
	Layanan Umum	4	0													Subbag Adum
	Layanan Sarana Internal	12	125.500				125.500									Subbag Adum
	Layanan Prasarana Internal	2	0													Subbag Adum
	Layanan Manajemen SDM	98	0													Subbag Adum

IKK	Rincian Output (RO)	Target RO	Pagu	Bulan Rencana Pelaksanaan dan Penarikan Dana												PJ
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	59	502.656				62.832		62.832	62.832	62.832	62.832	62.832	62.832	62.832	Subbag Adum
Nilai Kinerja Anggaran	Layanan BMN	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subbag Adum
	Layanan Perkantoran	12	16.004.848	360.000	1.235.740	1.835.740	1.235.740	1.835.740	1.835.740	1.235.740	1.835.740	1.235.740	1.835.740	1.235.740	2.087.448	Subbag Adum
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subbag Adum
	Layanan Manajemen Keuangan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subbag Adum
Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Layanan Manajemen Keuangan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Timker & Subbag Adum
Persentase Realisasi Anggaran	Layanan Manajemen Keuangan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Timker & Subbag Adum
Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori merah kurang dari 2 x 24 Jam	Layanan Reformasi Kinerja	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subbag Adum
Penyalanggunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	Layanan Bantuan Hukum	2	58.274			14.560			14.560			14.560			14.594	Timker 5